

## Negara-negara Nordic (*The Nordic Countries*)

SOPHIANA WIDIASTUTIE

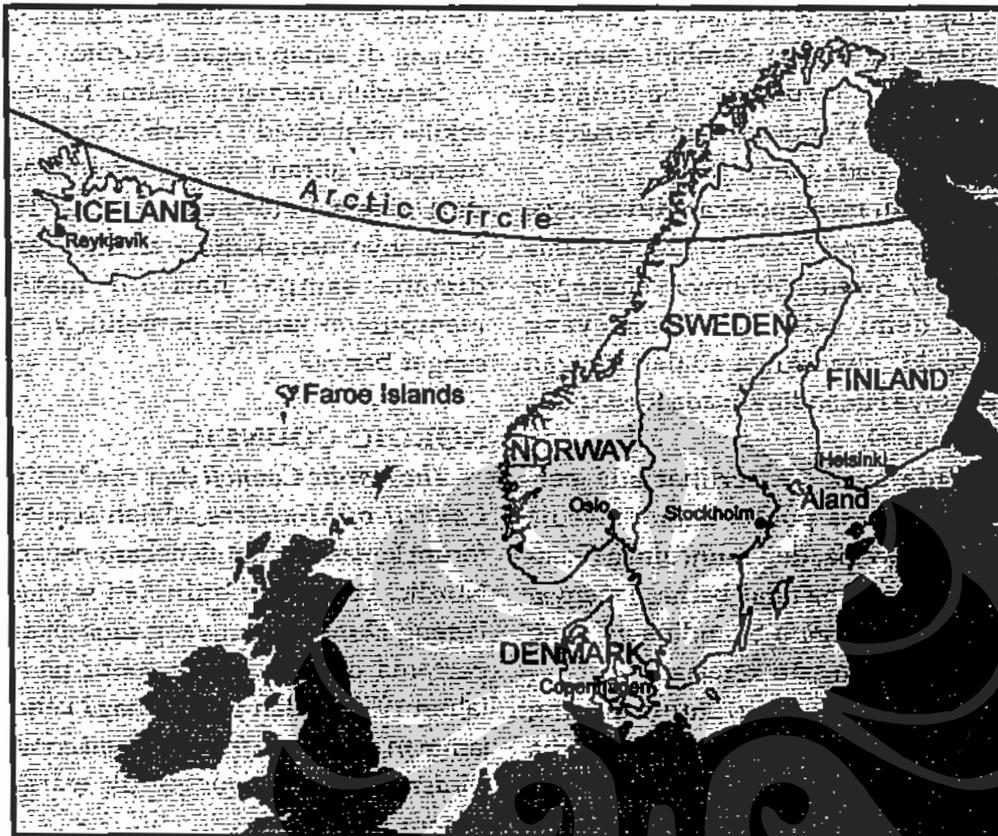
Mahasiswa PSKWE PPs Universitas Indonesia

### Gambaran Umum

*The Nordic Countries* atau *Negara-negara Nordic* adalah satu istilah yang digunakan untuk menyebut kumpulan lima negara di utara Eropa, yaitu *Denmark, Finlandia, Eslandia, Norwegia*, dan *Swedia*. Jumlah penduduk di seluruh Nordic sekitar 24 juta jiwa. Negara-negara Nordic ini juga merupakan anggota dari Nordic Council, dimana selain ke 5 negara tersebut, bergabung pula beberapa daerah otonomi antara lain: *Aland (Finlandia)*, *Faroe Island (Denmark)*, dan *Greenland (Denmark)*.

Dalam banyak pemakaian, istilah *Skandinavia* sering dipakai sebagai persamaan dari Nordic Countries. Sebenarnya, istilah Skandinavia tidak begitu tepat, karena, secara politik dan budaya Skandinavia hanya meliputi Swedia, Norwegia, dan Denmark; sedangkan secara geografis dan geologis Skandinavia hanya meliputi Swedia dan Norwegia yaitu kedua negara tersebut terletak di Semenanjung Skandinavia.

Sebelum abad ke 19, istilah *Nordic* atau *Northern* digunakan untuk menyebut wilayah Eropa Utara, termasuk Rusia-Eropa, negara-negara Baltik (pada saat itu Estonia, Livonia, serta Curonia), dan Greenland. Sedangkan di Uni Eropa, *Northern Dimension* merupakan istilah untuk menyebut kebijakan eksternal dan lintas-batas yang meliputi negara-negara Nordic, negara-negara Baltik dan Rusia. Akhir-akhir ini, Estonia mencari-cari hubungan mereka dengan negara-negara Nordic, kedekatan bahasa dan budaya dengan Finlandia, dan kesamaan budaya dan sejarah dengan negara-negara Skandinavia yang lain. Pada tahun 1999, Menteri Luar Negeri Estonia Toomas Hendrik Ilves berpidato dengan judul "Estonia sebagai sebuah negara Nordic" di Swedish Institute for International Affairs. Pada tahun 2003, Kementrian Luar Negeri Estonia juga mengadakan pameran yang berjudul "Estonia: Nordic with a Twist". Dan pada tahun 2005, Estonia



<http://en.wikipedia.org/wiki/Europe>

juga bergabung dengan European Union Nordic Battalion Group.

Negara-negara Nordic masing-masing disatukan secara sejarah dan budaya. Selama jaman Viking, seluruh negara-negara Skandinavia mempunyai budaya, bahasa dan agama yang sama yaitu bahasa *Old Norse* yang berakar dari bahasa Jerman dan *Norse Mythology* yang merupakan kumpulan kepercayaan dan cerita-cerita yang dibawa rumpun bangsa Jerman utara di masa lalu. Sedangkan Finlandia memiliki budaya, mitologi, dan bahasa yang berbeda yaitu *Finno-Ugric*.

Sesudah agama Kristen masuk pada sekitar tahun 1000, dimulailah proses penyatuan Denmark, Norwegia, dan Swedia sebagai kerajaan yang terpisah. Finlandia menjadi bagian Swedia pada pertengahan tahun 1200, sedangkan Eslandia, Faroe Islands, Shetland Islands, Orkney dan sebagian besar Skotlandia dan Irlandia menjadi bagian Norwegia.

Pada abad 14 Norwegia, Denmark dan Swedia bergabung dalam satu *regent* yaitu *Kalmar Union*. Denmark dengan cepat memegang kendali,

tetapi pada awal abad 16 Swedia memisahkan diri kembali menjadi kerajaan terpisah. Sedangkan persatuan Denmark dan Norwegia berakhir pada tahun 1814.

Setelah menempatkan diri sebagai satu dari *Great Powers* di Eropa selama abad 17, Swedia akhirnya kehilangan satu demi satu *Dominions* yang dimiliki, puncaknya adalah dengan lepasnya Finlandia kepada Rusia pada tahun 1809.

Pada abad 19, terlihat ada persatuan secara politik antara Swedia dan Norwegia, dan munculnya Skandinavisme yang tidak berhasil menyatukan tiga negara Skandinavia yang lain ke dalam satu kerajaan.

Sesudah Perang Dunia I yang berakhir pada tahun 1917, Finlandia bergabung untuk pertama kalinya sebagai sebuah negara independen dan perspektif dari sebuah Nordic Community berhasil menggantikan impian tentang United Scandinavia. Setelah Perang Dunia II, Islandia mendapatkan kemerdekaannya dari Denmark dan dasar-dasar dari Nordic Council mulai diletakkan.

Negara-negara Nordic memberlakukan kebijakan yang serupa terutama di bidang sosial. Seluruh Nordic Countries menempatkan dana yang sangat besar yang berasal dari pajak untuk sektor kesejahteraan umum (*public welfare*) dan perluasan undang-undang sosial. Dalam sebagian besar kasus, hal ini disebabkan oleh ambisi pemerintahan Sosial

Demokrat yang berkuasa selama masa perang di setiap negara Nordic.

Sesudah memeluk agama Kristen sekitar akhir abad 1, Nordic Countries menganut aliran Protestan Reformasi dari gereja Barat selama abad 16. Semuanya mengikuti ajaran Lutheran, dimana sampai hari ini masih mempunyai jumlah pemeluk yang sangat banyak.

### NORDIC COUNCIL

*The Nordic Council* dan *the Nordic Council of Ministers* adalah sebuah forum kerjasama untuk negara-negara Nordic. Forum itu didirikan setelah Perang Dunia II dan yang dihasilkan pertama oleh forum tersebut pada tahun 1952 adalah pasar tenaga kerja, jaminan sosial dan *free movement across borders* tanpa paspor untuk warga negara Nordic.

Negara-negara anggota Nordic Council meliputi Denmark, Finland, Iceland, Norwegia, Swedia, serta daerah-daerah otonomi seperti Faroe Island (Denmark), Greenland (Denmark) dan Åland (Finlandia). Nordic Council berkantor di Copenhagen dan beberapa institusi dari Nordic Council tersebar di negara-negara anggotanya. Nordic Council tidak memiliki kekuatan formal untuk dirinya sendiri, tetapi setiap negara anggota harus melaksanakan setiap keputusan yang diambil melalui parlemen masing-masing negara. Nordic Council tidak mencampuri urusan kerjasama militer,

	
Working languages	Danish Norwegian Swedish
Seat	Copenhagen
President - Nordic Council	Rannveig Gudmundsdóttir
Chairman - Nordic Council of Ministers	Connle Hedegaard
Director - Nordic Council Secretariat	Frida Nokken
General Secretary - Nordic Council of Ministers Secretariat	Per Unckel
Currencies	Danish krone Norwegian krone Icelandic króna Swedish krona Euro (Finland)

*European Economic Community (EEC)*. Sebuah perjanjian sudah dinegosiasikan untuk mendirikan sebuah organisasi baru, NordEk berkedudukan di Malmö. Meskipun akhirnya ada kasus dimana Finlandia menolak meratifikasi perjanjian karena hubungan khususnya dengan Uni Soviet. Tanpa Finlandia gagasan ini menjadi tidak bisa dilaksanakan, dan Norwegia dan Denmark memilih untuk melamar sebagai anggota EEC. Denmark menjadi anggota EEC pada tahun 1973, tetapi pada tahun yang sama, melalui referendum, Norwegia batal menjadi anggota EEC. Swedia tidak melamar menjadi anggota EEC demi tetap menjaga netralitasnya. Tetapi akhirnya pada tahun 1995 Swedia dan Finlandia bergabung dengan Uni Eropa. Norwegia masih tetap belum bergabung.

sebagai contoh Denmark, Norwegia dan Iceland sebagai anggota NATO serta Finlandia dan Swedia yang netral.

Nordic Council menggunakan bahasa Swedish, Danish dan Norwegian untuk berkomunikasi diantara mereka. Dan konsentrasi dari Nordic Council adalah kerjasama antar-parlemen.

*The Nordic Council of Ministers* didirikan tahun 1971, bertanggungjawab terhadap kerjasama antar-pemerintahan. Pada tahun 1960an mereka merencanakan untuk membangun kerjasama Nordic dengan membuat satu organisasi yang mirip dengan

#### Welfare State

Ada tiga interpretasi utama dari gagasan Welfare State (Negara Kesejahteraan) :

1. Peraturan mengenai pelayanan kesejahteraan (*welfare services*) oleh negara. Sebuah model ideal dimana kesejahteraan penduduk dianggap sebagai tanggungjawab utama dari negara. Tanggungjawab ini komprehensif, karena semua aspek kesejahteraan harus dipertimbangkan.
2. Peraturan mengenai kesejahteraan dalam masyarakat. Di banyak "welfare states", terutama di Eropa

**Continental**, kesejahteraan tidak hanya menjadi kewajiban negara, tetapi juga menjadi kewajiban kelompok independen, sukarelawan, **mutualis** dan petugas negara.

3. Istilah "Welfare State" yang dimaksud adalah yang digagas oleh **Archbishop William Temple** pada saat Perang dunia 2, bukan istilah "welfare state" dari Nazi German pada saat perang Inggris.

### Perkembangan Welfare States

*Welfare states modern* berkembang melalui proses yang bertahap yang dimulai pada abad 19 dan berlanjut sampai dengan abad 20. Gagasan ini berbeda dengan skema sebelumnya yang berupa bantuan untuk kemiskinan sehubungan dengan kondisi secara umum pada masa itu.

Perkembangan dari asuransi sosial di Jerman pada masa pemerintahan Bismarck cukup membawa pengaruh pada perkembangan welfare state di Nordic. Beberapa skema, seperti yang ada di Skandinavia, didasarkan pada pengembangan otonomi serta pembuatan persyaratan-persyaratan yang saling menguntungkan. Dan banyak skema lain ditemukan di peraturan-peraturan pemerintah.

### Pro-kontra Welfare State

Konsep Welfare State banyak mengundang kontroversi, dan terjadi debat yang terus-menerus mengenai seberapa jauh tanggungjawab pemerintah terhadap kesejahteraan

warganya.

Argumentasi dari pro Welfare State:

- *humanitarian* – gagasan agar rakyat tidak menderita
- *democratic* – pemilih di sebagian besar negara-negara Nordic menginginkan perluasan jaminan sosial secara bertahap
- *ethical – reciprocity* adalah prinsip moral yang universal, dan sebagian besar sistem kesejahteraan berdasarkan pola "saling". Altruisme atau menolong sesama adalah kewajiban moral di hampir semua budaya, dan bantuan serta dukungan untuk orang yang miskin adalah merupakan prinsip moral yang universal.
- *religious* – sebagian besar agama dunia menekankan akan pentingnya organisasi sosial dibandingkan dengan kepentingan diri pribadi semata. Kewajiban religius termasuk kewajiban membantu dan solidaritas kepada sesama.
- *mutual self-interest* – beberapa sistem nasional mendorong pertumbuhan *mutual insurance*.
- *economic* – program sosial yang ditujukan untuk berbagai macam fungsi ekonomi, seperti misalnya: regulasi terhadap permintaan dan struktur pasar tenaga kerja.
- *social* – program sosial yang ditujukan untuk bidang pendidikan, keluarga dan pekerjaan.
- *the failure of the private sector* – memberikan advokasi mengenai

ketentuan-ketentuan sosial yang diwajibkan pada sektor privat yang bertentangan dengan tujuan sosial.

Adapun argumentasi kontra *welfare state* adalah:

- *libertarian* – intervensi negara melanggar kebebasan individu; individu tidak seharusnya tergantung pada subsidi pihak lain untuk kepentingannya.
- *conservative* – pengeluaran sosial memberikan efek yang kurang baik bagi perilaku, memupuk ketergantungan dan menurunkan semangat kerja.
- *economic* – pengeluaran sosial membutuhkan biaya besar dan pajak yang tinggi. *Welfare state* memberikan efek yang kurang baik bagi ekonomi sehingga secara paradoks memberikan efek negatif pada kesejahteraan rakyat.
- *individualist* – pengeluaran sosial mengurangi kebebasan menikmati kemakmuran dan kesuksesan individual dengan membagikan sebagian dari kemakmurannya kepada orang lain (argumen ini juga penting bagi kaum libertarian dan konservatif).
- *anti-regulatory* – *welfare state* adalah pembenaran dari kontrol negara yang lebih besar kepada bisnis, membatasi pertumbuhan dan menciptakan pengangguran.
- *the free market* – advokasi kepada pasar akan mendorong produksi yang lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan menyelenggarakan program-program sosial.

## DENMARK

Kerajaan Denmark (Danish: *Kongeriget Danmark*) adalah negara Nordic yang terkecil dan merupakan anggota Uni Eropa.

### KONGERIGET DANMARK



### Sejarah

Asal-usul Denmark pada jaman prasejarah tidak diketahui secara pasti. Sebelum dihuni bangsa Scandinavians, Denmark merupakan tempat tinggal bangsa Celts —sebagai bukti adalah dengan ditemukannya alat ritual untuk membunuh dan makam.

Bangsa Danevirke tertua hidup pada abad ke-7, dan pada saat yang

sama muncul alfabet Runic. Kota tertuanya: Ribe (sekitar tahun 810).

Sampai dengan abad ke-11 bangsa Danes dikenal sebagai Vikings, bersama dengan Norwegians dan Swedes, mengoloni, menyerang, dan berdagang di seluruh bagian Eropa. Beberapa arkeolog dan sejarawan mempercayai bahwa Vikings telah mengembara sampai ke Amerika. Mereka melakukan perjalanan dari Skandinavia ke Iceland, kemudian ke Greenland dan akhirnya ke Amerika.

Selama beberapa waktu Kerajaan Denmark menguasai sebagian Inggris dan Irlandia, Norwegia, Swedia, Finlandia, Iceland, Perancis terutama Normandia dan sebagian dari Virgin Islands, Tranquebar di India, sebagian pantai Baltik dan sekarang adalah pantai utara Jerman, Scania, Blekinge dan Halland yang merupakan bagian dari Denmark sejak awal sejarah, tetapi menjadi bagian Swedia sejak tahun 1658. Persatuan dengan Norwegia berakhir tahun 1814, ketika Norwegia masuk dalam persatuan baru dengan Swedia (tahun 1905).

Pergerakan nasional dan liberal di Denmark mendapatkan momentum pada tahun 1830an, dan sesudah Revolusi Eropa pada tahun 1848 Denmark menjadi sebuah monarki konstitusional pada 5 Juni 1849.

Sesudah Perang Schleswig II (Danish: *Slesvig*) tahun 1864 Denmark dipaksa menyerahkan Schleswig-Holstein kepada Prussia, dalam sebuah kekalahan yang meninggalkan

bekas yang sangat dalam bagi identitas nasional Denmark.

Setelah peristiwa ini Denmark menganut kebijakan netral, sehingga pada Perang Dunia I Denmark bersikap netral. Ketika Jerman kalah perang, melalui Versailles powers, Denmark ditawarkan untuk mendapatkan kembali Schleswig-Holstein. Kwatir menghadapi tuntutan Jerman, Denmark menolak untuk menerima kembali Holstein, tetapi mendesak dalam sebuah plebisit atau referendum agar Schelswig dikembalikan ke Denmark. Tahun 1920, berdasarkan hasil plebisit, Northern Schleswig dikembalikan kepada Denmark.

Meski bersikap netral, Denmark diinvasi Jerman (*Operation Weserübung*) pada 9 April 1940. Walaupun disetujui untuk menjalankan pemerintahannya sendiri, Denmark tetap dikuasai secara militer sampai Perang Dunia II. Sesudah perang, Denmark menjadi salah satu pelopor NATO dan tahun 1973 bergabung dengan *European Economic Community* (selanjutnya menjadi Uni Eropa).

### Politik dan Pemerintahan

Pada tahun 1849 Denmark menjadi sebuah monarki konstitusional dengan memberlakukan sebuah konstitusi baru. Monarki secara formal adalah pemimpin negara, sebuah peran seremonial, sejak kekuasaan eksekutif menjalankan kabinet menteri-menteri yang menempatkan perdana menteri berperan sebagai "orang pertama

diantara orang-orang yang setingkat" — *the first among equals (primus inter pares)*.

Kekuasaan legislatif dilindungi oleh Pemerintah maupun parlemen, dikenal sebagai *Folketing* yang beranggotakan tidak lebih dari 179 anggota. Pengadilan Denmark secara fungsi dan administrasi independen terhadap pengaruh eksekutif dan legislatif.

Pemilihan umum untuk parlemen dilaksanakan setiap 4 tahun sekali, tetapi perdana menteri dapat meminta dilakukan pemilu dipercepat. Bila parlemen berhasil melakukan voting untuk tidak percaya (*a vote of no confidence*) kepada perdana menteri, maka seluruh anggota pemerintahan harus mengundurkan diri.

#### Pemerintahan

Denmark adalah monarki konstitusional dengan monarki yang hampir tidak terputus selama 1000 tahun (kecuali pada masa peralihan tahun 1332 – 1340). Pemimpin kerajaan saat ini adalah Queen Margaret II, yang mempunyai fungsi seremonial antara lain mengangkat perdana menteri (*Statsminister*) dan Kabinet Denmark. Meskipun demikian, ia harus selalu berkonsultasi dengan ketua parlemen untuk menjalankan fungsinya.

Anggota kabinet biasanya dipilih dari luar *Folketing*. Antara tahun 1849 – 1953, the *Folketing* adalah *a house of a bicameral Rigsdag*, dan *house* yang lain adalah *Landsting*, yang dipilih secara

tidak langsung. Tetapi Konstitusi 1953 (*the 1953 Constitution*) membentuk sebuah unicameral *Folketing* yang beranggota tidak lebih dari 179 anggota, termasuk 2 anggota dipilih dari Faore Island dan 2 anggota dari Greenland. Pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen dilaksanakan 4 tahun sekali, tetapi perdana menteri dapat membubarkan *Folketing* dan meinta dilakukan pemilu baru.

Anggota *Folketing* dipilih dengan sistem representasi proporsional yang complicated, setiap partai harus mendapatkan paling sedikit 2% dari total pemilih secara nasional. Pada Pemilu 2005, terdapat 7 partai peserta pemilu, partai terbesar mendapatkan 52% total suara dan peserta pemilu sekitar 85%.

#### Kondisi Politik

Kehidupan politik di Denmark teratur dan demokratis. Perubahan politik berjalan secara bertahap melalui suatu proses konsensus, serta metode dan perilaku politik secara umum bersifat moderat.

Sosial Demokrat, dalam sejarahnya dikenal sebagai sebuah gerakan pekerja kelas menengah yang *well-organized*, mempunyai kekuatan baik secara sendiri dalam kabinet minoritas (*minority cabinets*) maupun sebagai partai yang dominan dalam kabinet koalisi (*coalition cabinets*) sepanjang periode setelah perang.

Selama rentang tahun 1982 – 1993, dan sejak Pemilu 2001, Denmark

dipimpin oleh Koalisi Liberal-Konservatif yang dipimpin oleh Anders Fogh Rasmussen sebagai Perdana Menteri.

Dengan keadaan ini, secara implisit mudah dibuktikan bahwa dalam sebuah koalisi minoritas terjadi kegagalan untuk mencapai konsensus terhadap isu-isu reformasi pasar tenaga kerja, perpajakan, dan *welfare system*. Konsensus pengambilan keputusan adalah keunggulan yang paling utama dalam politik Denmark. Hal ini sering membuat sebuah partai kecil dapat memainkan peran yang lebih besar dibandingkan dengan perkiraan kekuatan partai berdasarkan ukurannya.

#### Kondisi Partai Politik

Ada beberapa partai politik yang direpresentasikan di *Folketing* pada Pemilu 2005. Partai-partai tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut

(berdasarkan perolehan suara)..

#### Pemilu 2005 di Denmark

Pemilu Denmark memilih sebuah badan pembuat Undang-Undang (*legislature*) pada tingkat nasional. Parlemen Denmark (*Folketinget*) mempunyai 179 anggota yang dipilih untuk masa 4 tahun. Sebanyak 135 anggota dipilih berdasarkan representasi proporsional dari 17 konstituen dan 40 lainnya adalah dibagikan secara proporsional berdasarkan total suara dari setiap partai. Faroe Islands dan Greenland langsung diberikan hak masing-masing 2 anggota.

Denmark mempunyai sistem multi partai dengan dua atau tiga partai kuat dan biasanya partai ketiga yang berhasil terpilih. Pemilu 2005 dilaksanakan pada 8 Februari 2005. Perdana Menteri Anders Fogh Rasmussen dari Venstre kembali terpilih dengan mendapatkan banyak

NAMA PARTAI	PEMIMPIN PARTAI	JUMLAH SUARA (%)
Venstre ( <i>Liberal Party</i> )	Anders Fogh Rasmussen	52
Social Democrats ( <i>Socialdemokraterne</i> )	Mogens Lykkesøft	47
Danish People's Party ( <i>Dansk Folkeparti</i> )	Pia Kjaersgaard	24
Conservative People's Party ( <i>Det Konservative Folkeparti</i> )	Bendt Bendtsen	18
Danish Social Liberal Party ( <i>Det Radikale Venstre</i> )	Marianne Jelved	17
Socialist People's Party ( <i>Socialistisk Folkeparti</i> )	Holger K. Nielsen	11
Unity List ( <i>Enhedslisten</i> ): Collective leadership	Collective leadership	6

kursi di parlemen. Pemerintahan koalisi antara Partai Liberal dan Conservative People's Party semakin kuat. Mereka tampaknya juga didukung oleh Danish People's Party yang mendapatkan 2 kursi. Danish Social Liberal Party (*Radikale Venstre*) memperoleh keuntungan paling besar dibandingkan partai lain, meskipun tetap berada di luar kelompok partai yang memerintah.

Pada pemilu kali ini terlihat bahwa untuk kedua kalinya partai Sosial Demokrat bukanlah partai terbesar di parlemen, sebuah perubahan pada abad 20. Partai ini kehilangan 5 kursi dan pemimpin partai Mogens Lykketoft mengundurkan diri segera setelah pemilu selesai dilaksanakan.

Perdana menteri Rasmussen meminta dilakukan pemilu pada 18 Januari 2005. Ia menyatakan bahwa sebenarnya bisa meminta waktu yang lebih cepat, tetapi pada tahun 2004 terjadi gempa bumi di Lautan Hindia yang memakan korban jiwa beberapa warga Denmark, sehingga pemilu ditunda.

Rasmussen sebenarnya masih memiliki sisa waktu 1 tahun dalam periodenya, tetapi ia ingin diadakan pemilu sebelum pemilihan tingkat kota diadakan pada bulan November. Alasannya adalah ia ingin mendapatkan mandat yang lebih jelas untuk melakukan pembenahan pada pemerintahan tingkat kota dan tingkat daerah.

### *Anders Fogh Rasmussen*

Anders Fogh Rasmussen, lahir 26 Januari 1953, adalah perdana menteri Denmark saat ini. Partai Liberalnya (*Venstre*) memenangkan pemilu pada pemilu 2001, mengalahkan pemerintahan Poul Nyrup Rasmussen dan kemudian membentuk *the Cabinet of Anders Fogh Rasmussen I*. Pemilu itu menandai perubahan yang dramatis pada politik Denmark. Ini adalah pertama kali sejak tahun 1920 partai Sosial Demokrat kehilangan posisinya sebagai partai terbesar di Folketing. Sejak itu partai Liberal melakukan koalisi dengan partai Konservatif untuk membentuk pemerintahan minoritas, memenangkan Pemilu 2005. Agenda pemerintahan Rasmussen lebih ke arah sayap kanan dibanding dengan yang sebelumnya. Ia lebih mendorong ke arah deregulasi, privatisasi, dan membatasi ukuran pemerintahan. Pemerintahannya juga memberlakukan peraturan yang membatasi jumlah imigran yang datang ke Denmark.

Rasmussen memegang pimpinan Uni Eropa pada bulan Juli – Desember 2002 untuk membuktikan dedikasinya pada agenda Pro-EU dan menjaga prinsip-prinsip dari *the Ellemann-Jensen-Doctrine*, yaitu sebuah doktrin yang digagas menteri luar negeri Denmark terdahulu, Uffe Ellemann-Jensen, untuk mempromosikan kemampuan sebuah negara kecil dalam memenangkan pengaruh di tatanan dunia.

## FINLANDIA

*The Republic of Finland* (Finnish: *Suomen tasavalta*, Swedish: *Republiken Finland*) adalah negara Nordic yang terletak di timur laut Eropa.

Jumlah penduduk Finlandia hanya 5 juta jiwa dalam luas wilayah 300.000 km<sup>2</sup>, menjadikannya sebagai negara di urutan ke-162 berdasarkan jumlah populasi dan urutan ke-13 dalam *Human Development Index* yang dikeluarkan PBB pada tahun 2005.

### SUOMEN TASAVALTA REPUBLICEN FINLAND

	
Official Language	Finnish, Swedish
Capital	Helsinki
President	Tarja Halonen
Prime Minister	Matti Vanhanen
Independence	From Russia
- Declared	6 December 1917
- Recognized	3 January 1918
Currency	Euro (€)

### Sejarah

Kesimpulan dari bukti arkeologi menunjukkan bahwa wilayah Finlandia sudah ada sejak tahun 8500 SM, ketika Jaman Batu (*Stone Age*),

sebagai sebuah daratan es pada saat mencairnya es di akhir Jaman Es.

Penduduk paling awal adalah pemburu-perambah yang hidup dari apa yang didapat dari hutan dan laut. Tembikar ditemukan dari tahun 5300 SM. Sistem tukar-menukar ditemukan dari indikasi penyebaran *asbestos* dan *soapstone* yang terdapat di Finlandia Timur, dan ditemukannya batu api di Selatan Skandinavia dan Rusia, pahatan di Danau Onega dan kepala tombak ditemukan di Finlandia Utara.

Ada dugaan bahwa penduduk yang berbahasa Finno-Ugric tiba di Finlandia sejak Jaman Batu, bahkan kemungkinan mereka adalah penduduk Mesolithic pertama. Kehadiran dari *the Battle-Axe Culture* (*Cord-Ceramic Culture*) di Finlandia Selatan sekitar tahun 3200 SM dianggap sebagai awal dari kehidupan agrikultur. Namun demikian, berburu dan menangkap ikan tetap menjadi mata pencaharian yang penting, terutama di bagian utara dan timur Finlandia.

Jaman Tembaga (1500 – 500 SM) dan Jaman Besi (500 SM – 1200 M) adalah masa pembentukan karakter Finlandia yang disebabkan kontak yang lebih sering dengan Skandinavia, Rusia Utara dan wilayah Baltik. Tidak banyak informasi tertulis mengenai sejarah Finnish sebelum abad ke 13 M. Sejarah itu hanya bisa kita perhatikan dari cerita-cerita fiksi mengenai raja-raja Finnish dalam hikayat-hikayat Skandinavia.

Permulaan dari bergabungnya

Finlandia hampir selama 700 tahun dengan Kerajaan Swedia terjadi pada tahun 1154 dan diperkirakan saat itu dimulai pengenalan ajaran Kristen oleh raja Swedia King Erik. Meskipun sebenarnya banyak penyembah berhala yang telah memeluk Kristen beberapa ratus tahun sebelumnya.

Swedish menjadi bahasa yang dominan di bidang administrasi dan pendidikan; sedangkan Finnish yang terutama dipakai sebagai bahasa kaum petani (*peasantry*), dianggap sangat berguna untuk menuliskan literatur religius.

Selama abad ke 18, bisa dikatakan sebanyak dua kali seluruh Finlandia dikuasai oleh kekuatan Rusia (1714-1721 dan 1742-1743), dikenal oleh bangsa Finn dengan sebutan Greater Wrath dan Lesser Wrath. Sesudah itu, "Finland" menjadi bahan pembicaraan utama dari suatu wilayah – yang diperdebatkan di Swedia dan yang dijanjikan oleh Rusia untuk dilindungi dari tekanan Swedia.

Pada tahun 1808, Finlandia ditaklukkan angkatan perang dari Kaisar Rusia Alexander I dan setelah itu menjadi sebuah daerah otonomi Grand Duchy yang mempunyai hubungan pribadi dengan Kekaisaran Rusia sampai dengan tahun 1917. Untuk menjaga ikatan kultural dan emosional dengan Swedia, bahasa Finnish diupayakan untuk digunakan baik pengadilan imperial maupun pemerintah Finnish serta gerakan nasionalis yang kuat, yang disebut

*Fennomania*, sekitar tahun 1860-an.

Tonggak bersejarah dari perkembangan ini adalah publikasi dari apa yang kemudian menjadi *Finland's national epic, the Kalevala*, pada tahun 1835 dan Finnish mendapatkan persamaan status secara legal seperti Swedia pada tahun 1892.

Pada 6 Desember 1917, sesudah terjadi Revolusi Bolshevik di Rusia, Finlandia mendeklarasikan kemerdekaannya. Kemerdekaan ini disetujui para Bolshevist Rusia, tetapi sejalan dengan adanya perang sipil di Rusia dan di Finlandia, dan adanya pengiriman aktivis (disebut *Heimosodat*, 'perang antar suku', di Finnish) membuat hubungan menjadi rumit.

Pada 1918, Finlandia mengalami peperangan singkat tapi menyakitkan pada Perang Sipil, yang memberi warna pada politik dalam negeri selama beberapa tahun. Perang Sipil dipicu oleh pertikaian antara "kaum putih" yang didukung oleh Imperial Jerman dengan "kaum merah" yang didukung oleh Bolshevist Rusia. Kaum merah terdiri dari para pekerja properti- sedikit petani dan pekerja industri yang, meskipun secara universal mempunyai hak pilih di tahun 1906, mendapati diri mereka tidak mempunyai pengaruh politik.

Perbatasan Finnish-Rusia disetujui melalui "Treaty of Tartu" (tahun 1920), sebagian besar berdasarkan sejarah perbatasan tetapi ditambah dengan Petsamo dan pelabuhan Laut Barents yang menuju Finlandia.

Selama Perang Dunia II, Finlandia berperang melawan Uni Soviet dua kali, yaitu di Perang Musim Dingin (*Winter War*) tahun 1939–1940 dan di *Continuation War* pada tahun 1941–1944, berdekatan waktunya dengan Operation Barbarossa, invasi Jerman terhadap Uni Soviet. Hal tersebut diikuti *Lapland War* pada tahun 1944–1945, ketika Finlandia memaksa Jerman keluar dari Finlandia Utara.

Perjanjian ditandatangani pada tahun 1947 dan 1948 dengan Uni Soviet termasuk kewajiban, pengendalian dan perbaikan di Finlandia *vis-à-vis* Uni Soviet sebagaimana konsesi teritorial yang lebih jauh oleh Finlandia (bandingkan dengan *Moscow Peace Treaty* pada tahun 1940). Finlandia menyerahkan sebagian besar Finnish Karelia, Salla dan Petsamo.

Sesudah Perang Dunia II, Finlandia berada pada zona abu-abu antara negara Barat dan Uni Soviet. The "YYA Treaty" (*Finno-Soviet Pact of Friendship, Cooperation, and Mutual Assistance*) memberikan kepada Uni Soviet beberapa pengaruh dalam politik domestik Finlandia dan memberikan jaminan bahwa Finlandia akan mempertahankan wilayahnya dan udaranya dari Jerman atau NATO. Beberapa politisi, seperti Presiden Kekkonen (1956–1981), menggunakan hubungan mereka dengan Kremlin untuk menangani partai-partai kontroversial, sehingga Uni Soviet mendapatkan lebih banyak

pengaruh, sebaliknya pekerja lain berpikir untuk melawan Komunis. Tetapi bagaimanapun Finlandia mengelola pemerintahan demokrasi dan ekonomi pasar, tidak seperti negara-negara lain yang berbatasan dengan Uni Soviet.

Masa sesudah perang adalah masa dimana ekonomi berkembang sangat pesat serta peningkatan kemakmuran dan stabilitas Finlandia. Negara agraris yang rusak akibat perang berganti menjadi pasar ekonomi dengan teknologi maju serta memiliki *social welfare system* yang *sophisticated*.

Dan ketika Uni Soviet jatuh pada tahun 1991 Finlandia mengalami penderitaan secara ekonomi, tetapi bebas melakukan apa yang diinginkannya dan bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 1995, dan Finlandia adalah pendukung dari Federalisme, berbeda dengan negara Nordic lain yang kebanyakan mendukung Konfederalisme.

### Politik Di Finlandia

Sistem politik di Finlandia adalah sistem parlementer, namun presiden juga mempunyai kekuasaan yang cukup besar. Sebagian besar kekuasaan eksekutif berada pada kabinet (*Finnish Council of State*) yang diketuai perdana menteri.

### Parlemen

Secara konstitusional, 200 anggota *unicameral* Parlemen Finlandia disebut *Eduskunta* (Finnish) atau *Riksdag*

(Swedish) adalah pemegang otoritas tertinggi di Finlandia. Parlemen boleh mengubah Konstitusi Finlandia (*Constitution of Finland*), memerintahkan pembubaran Kabinet dan menghapus hak veto Presiden. Tindakan ini bukan berdasarkan *judicial review*.

Pembuatan Undang-Undang bisa diusulkan oleh *Council of State*, atau oleh anggota *Eduskunta* yang dipilih untuk masa 4 tahun berdasarkan representasi proporsional melalui *open list* dari beberapa anggota distrik. Semua orang yang telah berumur 18 tahun, kecuali personil militer yang masih aktif bertugas dan beberapa hakim tinggi, berhak mengikuti pemilu.

Masa tugas parlemen adalah 4 tahun, meskipun demikian Presiden bisa membubarkan *Eduskunta* dan memerintahkan pemilu baru berdasarkan permintaan Perdana Menteri dan sesudah berkonsultasi dengan Juru Bicara Parlemen.

#### **Presiden**

Presiden dipilih untuk masa jabatan 6 tahun. Bersama-sama dengan Kabinet, Presiden bertanggungjawab terhadap kebijakan luar negeri, kecuali untuk perjanjian internasional dan keputusan damai atau perang harus meminta persetujuan Parlemen. Presiden adalah Komandan Angkatan Bersenjata. Ia bisa membuat dekret, menolak Undang-Undang dengan menggunakan hak veto, dan meminta sidang istimewa parlemen, serta

menominasikan dan secara formal menunjuk Perdana Menteri, dan sebagian anggota Kabinet.

#### **Kabinet (Council of State)**

*Council of State* atau Kabinet dibentuk oleh Perdana Menteri dan dan menteri-menteri berbagai departemen untuk pemerintah pusat sekaligus sebagai anggota *ex-officio* dari *the Chancellor of Justice*. Para menteri tidak wajib menjadi anggota *Eduskunta* dan tidak memerlukan identitas dari partai tertentu.

Setelah melakukan *hearing* dengan parlemen, presiden menominasikan calon perdana menteri untuk disetujui oleh parlemen secara voting. Perdana Menteri memilih anggota kabinet yang secara formal ditunjuk Presiden.

#### **Pemilihan Umum**

Sistem representasi proporsional mendorong munculnya banyak partai, sehingga tidak ada satu partai yang mempunyai kesempatan untuk memenangkan kekuasaan sendirian, oleh karenanya mereka harus melakukan kabinet koalisi dalam membentuk pemerintahan.

Pada pemilihan Parlemen 16 Maret 2003 ada dua partai dominan : Center Party (KESK) mendapatkan 55 kursi dan Social Democratic Party (SDP) mendapatkan 53 kursi dari 200 kursi yang ada. Kabinet yang baru dibentuk dari koalisi antara Center, Social Democrats, dan Swedish People's Party.

Partai-partai yang ada di Finlandia antara lain :

- Centre Party of Finland atau Finnish Centre (*Suomen Keskusta*, KESK)
- Christian Democrats (*Kristillisdemokraatit*, KD)
- Green League (*Vihreä Liitto*, VIHR)
- Left Alliance (*Vasemmistoliitto*, VAS)
- Liberals (*Liberaalit*, LIB)
- National Coalition Party / National Coalition (*Kansallinen Kokoomus*, KOK)
- Social Democratic Party of Finland (*Suomen Sosialidemokraattinen Puolue*, SDP)
- Swedish People's Party (*Svenska Folkpartiet*, SFP)
- True Finns (*Perussuomalaiset*, PS)

#### Globalisasi

Hubungan unik Finlandia dengan Czarist Rusia, Uni Soviet dan sekarang Federasi Rusia mempunyai dampak yang sangat besar pada kebijakan luar negeri Finlandia dan kemampuan untuk melakukan globalisasi. Globalisasi Finlandia diwarnai dengan keinginan mereka untuk tidak mengganggu hubungan dengan tetangga mereka. Meskipun dengan hambatan ini, Finlandia akhirnya berhasil menjadi salah satu negara yang paling *globalised* di dunia.

Perkembangan Finlandia dari negara agrikultural menjadi negara yang sangat berhasil melakukan globalisasi sesuai dengan konsep yang disampaikan Robert Keohane dan

Joseph Nye mengenai Realism and Complex Interdependence. Setelah Finlandia mendapatkan kemerdekaannya dalam periode Winter-war, dan Perang Dunia II, muncullah berbagai karakter realisme politik. Selama Perang Dingin, kebijakan Finlandia mulai meninggalkan realisme, dan sebelum Uni Soviet runtuh Finlandia telah menganut *complex interdependence* yang lebih terbuka terhadap pemikiran dan tujuan yang visioner.

Sesudah runtuhnya Uni Soviet pada awal tahun 1990, Finlandia mengambil kesempatan untuk membebaskan diri dari pembatasan-pembatasan yang diberlakukan oleh Paris Peace Treaties, 1947. Terbebas dari ketakutan akan pengaruh Soviet, Finlandia mulai mengejar tujuan yang lebih cocok dengan ideologi Finnish.

*The Finnish-Soviet Agreement of Friendship*, kerjasama, dan mutual assistance (termasuk pembatasan-pembatasan di dalamnya) dinyatakan tidak berlaku lagi, tetapi Finlandia mengakui Federasi Rusia sebagai pihak yang berjasa pada USSR dan segera membuat draft perjanjian bilateral untuk menjaga hubungan baik di antara kedua negara.

Finlandia mulai bergabung dengan institusi-institusi Barat, ketika mereka tidak terlalu mempertahankan netralitasnya lagi. Kebijakan netral Finlandia berubah dari "netral aktif" menjadi "*military non-alignment*", dengan penekanan pada peningkatan

kemampuan pertahanan yang independen.

Kebijakan ini membawa mereka bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 1995, dan organisasi internasional lainnya, namun Finlandia tidak terlibat dalam kegiatan militer yang mengancam netralitasnya. Penjaga Perdamaian PBB adalah satu-satunya partisipasi militer yang diikuti oleh Finlandia.

## ESLANDIA

*Republik Eslandia* atau *The Republic of Iceland* (Icelandic: *Lýðveldið Ísland*) adalah negara pulau di utara Laut Atlantik di antara Greenland, Norwegia dan British Isles.

### LÝÐVELDIÐ ÍSLAND

	
Official Language	Icelandic
Capital and Largest city	Reykjavík
President	Ólafur Ragnar Grímsson
Prime Minister	Halldór Ásgrímsson
Independence - Sovereignty - Republic	1 December 1918 17 June 1944
Currency	Icelandic Króna

## Sejarah

Eslandia adalah salah satu dari pulau besar dunia yang tidak berpenduduk sampai ditemukan dan ditinggali imigran Norse dari Norwegia Barat pada akhir abad 9. Para keluarga, bersama-sama dengan para pembantu dan budak —kebanyakan adalah bangsa Celts dari Skotlandia dan Irlandia (dikenal sebagai *Westmen*). Bahkan menurut literatur terdapat bukti bahwa biarawan Irlandia telah tinggal di Eslandia sebelum kedatangan bangsa Norse, tetapi tidak ada bukti arkeologi yang mendukung pendapat tersebut.

*The Althing* (majelis umum) dibentuk pada tahun 930, sebagai tanda dimulainya Persemakmuran Eslandia (*Icelandic Commonwealth*). Ini adalah cikal-bakal dari parlemen modern Eslandia.

Eslandia adalah negara merdeka sampai tahun 1262, ketika menjadi koloni dari kerajaan Norwegia, dan dari tahun 1387 Eslandia dikuasai Denmark, sehubungan dengan bersatunya kedua kerajaan. Ketika persatuan itu dibubarkan pada tahun 1814, melalui *Treaty of Kiel*, dimana Norwegia mengambil alih Swedia, Eslandia menjadi bagian dari Danish.

Pengaturan dalam negeri secara terbatas diberikan pemerintahan Danish pada tahun 1874, dan protektorat yang menyerupai kemerdekaan dan kedaulatan terhadap masalah domestik diberikan pada tahun 1918. Urusan luar negeri dan pertahanan

masih dikuasai oleh Danes sampai dengan Perang Dunia II, ketika militer Jerman mengalahkan Denmark pada tahun 1940, otomatis Eslandia dikuasai oleh Allies (Jerman). Raja Danish secara *de jure* masih berdaulat di negara tersebut sampai pada tahun 1944, dan Republik Eslandia didirikan ketika terjadi kekosongan kekuasaan dari Denmark.

Republik Eslandia menjadi anggota NATO pada tahun 1949 dan menandatangani perjanjian dengan Amerika Serikat pada tahun 1951 untuk mengambil alih tanggungjawab pertahanan di Eslandia. Sampai saat ini Amerika Serikat masih menempatkan basis militer di Keflavik berdasarkan perjanjian tersebut, meskipun Eslandia sendiri tidak mempunyai militer.

Ekonomi Eslandia tergantung pada bidang perikanan, dan pada masa setelah perang terjadi beberapa pertikaian antara Eslandia dengan negara-negara tetangganya sehubungan dengan sumber penghasilan utama ini, salah satu yang bisa dicatat adalah pertikaianya dengan Inggris dalam *Cod War*.

Ekonomi Eslandia menjadi beragam setelah Eslandia membangun investasi di bidang industri berat, antara lain aluminium, serta deregulasi dan privatisasi di sektor keuangan. Eslandia adalah anggota *Common Market* Uni Eropa melalui EEA Agreement, tetapi tidak pernah melamar sebagai anggota Uni Eropa. Seandainya Eslandia bergabung

dengan Uni Eropa, maka mereka harus membuka perairan perikanan untuk anggota yang lain, dan hal ini bukan yang mereka inginkan.

### Politik

Parlemen modern di Eslandia disebut *Althing* atau *Alþingi*, yang didirikan pada tahun 1845 berdasarkan saran raja Denmark. Sebenarnya parlemen ini melanjutkan kembali apa yang pernah mereka lakukan pada tahun 930 pada masa Commonwealth dan terhenti pada tahun 1799. Althing memiliki 63 anggota, setiap anggota dipilih setiap 4 tahun sekali.

Presiden Eslandia berfungsi untuk kepentingan seremonial, menerima para diplomat, dan sebagai figur negara. Sedangkan kepala pemerintahan Eslandia adalah perdana menteri—bersama kabinet—melaksanakan pemerintahan. Kabinet ditunjuk oleh presiden sesudah pemilihan umum untuk Althing, namun demikian proses ini biasanya dilakukan oleh para pemimpin partai politik, yang memutuskan di antara mereka partai mana yang dapat duduk di kabinet dan bagaimana distribusi posisi yang dibagi di antara mereka (di bawah kondisi ada dukungan mayoritas di Althing).

Bila partai yang memimpin tidak dapat mencapai konklusi di antara mereka pada waktu yang telah ditentukan, Presiden dapat menggunakan kekuasaannya untuk menunjuk Kabinet pilihannya. Namun hal ini belum pernah terjadi sejak republik ini

berdiri tahun 1944, tetapi pada tahun 1942, kepala pemerintahan (*the regent*) di negara itu (Sveinn Björnsson, yang dipilih oleh Althing pada tahun 1941) memilih sendiri sebuah pemerintahan yang non-parliamentary. Pemerintahan itu akhirnya dalam kenyataannya memiliki seorang Presiden, dan Björnsson menjadi presiden pertama Eslandia pada tahun 1944.

Pemerintahan di Eslandia selalu merupakan koalisi dari dua partai atau lebih, sehubungan dengan kenyataan bahwa tidak ada satu partai yang mendapatkan mayoritas kursi di Althing. Perluasan kekuasaan politik yang dipunyai Lembaga Kepresidenan menjadi bahan perdebatan di antara para ahli bidang hukum di Eslandia, beberapa peraturan memberikan kekuasaan penting kepada Presiden, tetapi beberapa peraturan dan tradisi menunjukkan hal yang sebaliknya.

Presiden dipilih untuk masa jabatan 4 tahun (terakhir tahun 2004), Kabinet dipilih setiap 4 tahun sekali (terakhir tahun 2003) dan pemilihan Dewan Kota (*Town Council*) dilaksanakan 4 tahun sekali (terakhir tahun 2002).

Sampai dengan tahun 1991, keanggotaan Althing dibagi menjadi Majelis Rendah (*Lower House*) dan Majelis Tinggi (*Upper House*), tetapi kemudian berubah menjadi sistem unicameral penuh.

#### Pemilihan Parlemen 2003

Pemilihan Parlemen terakhir dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2003. Independence Party dan Progressive Party kehilangan 4 kursi di Althingi tetapi masih tetap memegang mayoritas di parlemen.

Hasil dari Pemilu 2003 di Eslandia dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Ketua Parlemen saat ini dipegang oleh **Halldór Blöndal** (Independence Party), dan pemilihan parlemen berikutnya dijadwalkan Mei 2007.

#### Pemilihan Presiden 2004

Pemilihan presiden yang terakhir dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2004. Secara tradisi, pemilihan presiden Eslandia tidak dipertarungkan bila presiden yang saat ini memegang jabatan bermaksud untuk mendapatkan mandat baru. Presiden

NAMAPARTAI	JUMLAH SUARA (%)	JUMLAH KURSI	SELISIH KURSI PEMILU SEBELUMNYA
Independence Party	33,68%	22	(-4)
Alliance	30,95%	20	(+3)
Progressive Party	17,73%	12	(0)
Left-Green Movement	8,81%	5	(-1)
Liberal Party	7,38%	4	(+2)

Eslandia saat ini adalah Ólafur Ragnar Grímsson yang dipilih pada tahun 1996 dengan 40,9% suara, dengan jumlah pemilih 85,9% dari 4 kandidat presiden.

Pada tahun 2000 ia terpilih kembali tanpa pihak yang beroposisi. Ketika Presiden mengumumkan keinginannya untuk mendapatkan mandat kembali di tahun 2004, dua orang kandidat bergabung, yaitu: (1) Ástþór Magnússon, seorang pengusaha dan agak militan, yang memenangkan 2,6% suara pada pemilu 1996 dan gagal mendapatkan 1500 pendukung ketika ia mencoba maju kembali di pemilu 2000, dan (2) Baldur Ágústsson, yang tidak begitu dikenal masyarakat.

Calon presiden Eslandia tidak bertarung berdasarkan politik, tetapi lebih mengandalkan kepribadian untuk menarik pendukung dan tampil sebagai sebuah simbol hidup bagi persatuan nasional. Lembaga kepresidenan adalah sebuah lembaga yang bisa dikatakan tidak mempunyai kekuasaan, sebagaimana sesuai tradisi presiden hanya menjalankan kekuasaan moral, meskipun Presiden Grímsson pernah menyampaikan gagasan untuk dilakukan diskusi terbuka tentang peran kepala negara.

Tidak biasanya terjadi dalam sejarah Republik Eslandia, pada tanggal 2 Juni 2004 Presiden Grímsson memveto sebuah media yang secara hukum dimiliki Althing, meskipun Perdana Menteri Eslandia saat itu, Davíð Oddsson, menyatakan bahwa

veto tersebut illegal karena putri presiden bekerja pada salah satu perusahaan yang terkena dampak pemberitaan. Ada sedikit keraguan bahwa Presiden Grímsson akan bisa terpilih kembali, dan dengan 20,6 % suara mengosongkan pilihannya, bisa dijadikan bukti bahwa banyak pemilih yang tidak menyetujui veto tersebut.

## NORWEGIA

**Kerajaan Norwegia** adalah sebuah negara Nordic yang terletak di sisi barat Semenanjung Skandinavia, berbatasan dengan Swedia, Finlandia dan Rusia, dengan wilayah laut yang berbatasan dengan perairan Denmark dan Inggris. Norwegia memiliki garis pantai yang memanjang sepanjang Laut Atlantik Utara dan terdapat *fjords* yang terkenal.

Pulau terdekat, Svalbard dan Jan Mayen, berada di bawah kedaulatan Norwegia dan dianggap sebagai bagian dari Kerajaan Norwegia, sedangkan Bouvet Island di Laut Atlantik Selatan dan Peter I Island di Laut Pasifik Selatan merupakan daerah otonomi Norwegia tetapi tidak dianggap sebagai bagian Kerajaan. Selain itu, Norwegia mengklaim Dronning Maud Land di Antartika menjadi daerah kekuasaannya.

## Sejarah

Pada abad ke-9, Norwegia terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil. Harald Fairhair (raja pertama Norwegia) dikenal yang menggabungkan

kerajaan-kerajaan kecil menjadi satu (tahun 872) melalui Perang Hafrsfjord ia mendirikan negara feodal.

Jaman Viking (abad 6 – 11) adalah masa penyatuan negara dan ekspansi. Norwegia mengkoloni Eslandia, the Faroe Islands, Greenland dan sebagian the British Islands dan berusaha menguasai L'Anse aux Meadows di Newfoundland, Canada (sebagaimana diceritakan di *the Vinland of The Saga of Eric the Red*).

Norwegia menguasai kota-kota di Irlandia seperti Dublin, Limerick, Cork, Waterford, serta kota Anglo-Saxon Eoforwic, kemudian mengganti namanya menjadi Jorvik, yang sekarang dikenal dengan nama York. Seorang Norwegia bernama Rollo menginvasi Normandia di Perancis, dan keturunannya yang dikenal dengan nama William the Conqueror berhasil menginvasi dan menguasai Inggris pada tahun 1066.

Garis kerajaan Norwegia terputus pada tahun 1387, sebagian disebabkan oleh resesi besar setelah terjadinya wabah penyakit pes pada tahun 1349, yang memakan korban sebagian besar penduduk, dan sebagian disebabkan oleh putra Ratu Margrethe, pewaris tahta Norwegia, meninggal pada usia 17 tahun.

Negara ini memasuki periode yang panjang sebagai bagian yang lebih lemah dalam persatuannya dengan Denmark dan Swedia. Dengan pemaksaan pengenalan pada Protestanisme pada tahun 1537, Norwegia kehi-

**KONGERIKET NORGE**




Royal Motto:  
*All for Norge (Everything for Norway)*  
 1814 Eidsvoll oath:  
*Enig og tro til Dovre faller (United and Loyal until the Dovre Mountains Fall)*

Capital	Oslo
Official Languages	Norwegian (Bokmål and Nynorsk), plus Sami in six municipalities
Government	<b>Constitutional monarchy</b>
King	Harald V
Prime Minister	Kjell Magne Bondevik
Constitution	17 May 1814
Independence	From union with Sweden
- Declared	7 June 1905
- Recognised	26 October 1905
Currency	Norwegian Krone

langan aliran yang selama ini menjadi jamaah peninggalan Saint Olay di tempat keramat Nidaros. Bersama dengan hilangnya aliran itu, secara ironis, hilang pula ikatan kehidupan sejarah dan ekonomi dari sebagian Eropa. Dalam pandangan romantisme nasional, abad ke-19 ini dikenal dengan "400 tahun malam hari".

Setelah Denmark-Norwegia dikuasai oleh Napoleon pada Perang Napoleonic, Norwegia diserahkan kepada Raja Swedia pada tahun 1814. Tetapi Norwegia mengumumkan kemerdekaannya, mengikuti sebuah konstitusi yang berdasarkan model

Amerika dan Perancis dan memilih pangeran Denmark Christian Fredrik sebagai raja pada tanggal 17 Mei 1814. Norwegia menjadi bagian Swedia secara personal (*personal union*), tetapi tetap menjaga konstitusi liberal dan institusi independennya, kecuali untuk urusan luar negeri.

Dengan munculnya ketidakpuasan pada persatuan tersebut selama akhir abad 19, romantisme nasional, berkembang menjadi budaya nasional, kesusasteraan dan lukisan (Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson, Hans Gude, Adolph Tiedemand), membuahkin keinginan untuk mengakhiri persatuan itu pada 7 Juni 1905.

Pemerintah Norwegia menawarkan mahkota kerajaan pada pangeran Denmark Prince Carl. Setelah dilakukan referendum yang menyetujui monarki tersebut, Parlemen dengan suara bulat mengangkat Prince Carl sebagai raja. Ia mengganti nama menjadi Haakon VII. Pada tahun 1913, perempuan Norwegia mendapatkan hak pilihnya.

Norwegia adalah negara netral pada Perang Dunia I. Norwegia juga berusaha menyatakan netral pada Perang Dunia II, tetapi diinvasi Jerman pada tanggal 9 April 1940 yang dikenal dengan *Operation Weserübung*. Jerman juga berencana menguasai Norwegia untuk mendapatkan keuntungan strategis di pantai Atlantik, tetapi dihalangi raja dan pemerintahannya. Tentara Jerman bertahan selama 2 bulan di Norwegia,

tetapi raja dan pemerintahannya melanjutkan perlawanannya di pembuangannya di Rotherhithe, London.

Pada hari invasi dilaksanakan, kolaborasi antara pemimpin partai kecil National-Socialist party Nasional Samling – Vidkun Quisling – mencoba melawan kekuatan itu, tapi kekuatan pendudukan Jerman mengalahkan mereka.

Kekuasaan yang sebenarnya di Norwegia dipegang oleh seorang pemimpin pendudukan Jerman *Reichskommissar* Josef Terboven, sebagai 'menteri-presiden' (*minister president*) ia membentuk sebuah pemerintahan di bawah kendali Jerman.

Pada tahun 1944, Jerman meng-evakuasi provinsi Finnmark dan Troms Utara, dengan menggunakan taktik Bumi Hangus untuk membuat daerah tanpa manusia yang luas sebagai respons kepada Pasukan Merah (Rusia) yang menyerang posisi mereka di timur Finnmark. Rusia menyerang melalui Finnmark timur untuk membuat sebuah tempat perlindungan setelah berhasil mengusir Jerman dari Semenanjung Kola di Laut Arktik. Setelah perang, Rusia secara damai mengembalikan daerah itu kepada Norwegia. Jerman di Norwegia menyerah pada tanggal 8 Mei 1945.

Pendudukan Jerman pada Perang Dunia II, membuat Norwegia menjadi makin skeptis terhadap konsep

netralitas. Mereka berubah menggunakan konsep "Sekuriti Kolektif". Norwegia adalah salah satu penandatangan North Atlantic Treaty pada tahun 1949, dan sebagai anggota pendiri dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan berhasil membawa Trygve Lie sebagai Sekjen PBB pertama.

Norwegia dua kali melakukan voting untuk bergabung dengan Uni Eropa (1972 & 1994), melalui European Economic Area. Namun mereka telah menjadi anggota di organisasi Eropa yang lebih kecil yaitu European Free Trade Association (EFTA).

### Politik

Norwegia merupakan Monarki Konstitusional dengan sistem pemerintahan parlementer. *The Royal House* adalah cabang dari keluarga kerajaan Glücksburg, yang aslinya berasal dari Schleswig-Holstein, Jerman. Fungsi dari raja Harald V terutama hanya untuk seremonial, tetapi ia mempunyai pengaruh sebagai simbol dari persatuan nasional. Meski Konstitusi 1814 memberikan kekuasaan penting pada raja, tetapi pelaksanaannya selalu dilakukan oleh Council of State atas nama raja (*King's Council* atau *Kabinet*).

The Council of State terdiri dari perdana menteri dan anggotanya, secara formal ditunjuk oleh Raja. Sejak tahun 1884, parlementerisme memastikan bahwa kabinet harus mendapat dukungan dari parlemen, sehingga

penunjukkan oleh Raja benar-benar hanya formalitas.

Parlemen Norwegia —*the Storting* (Norwegian: *Stortinget*), saat ini mempunyai 169 anggota (meningkat dari 165 anggota, efektif sejak pemilu 12 September 2005). Anggotanya dipilih dari 19 *counties* untuk masa jabatan 4 tahun dengan sistem representasi proporsional.

Sesudah pemilu, Storting dibagi menjadi dua chambers, Odelsting and Lagting, yang melakukan pertemuan secara terpisah atau bersama-sama tergantung dari agenda pertemuan. Hukum-hukum diusulkan Odelsting dan diputuskan oleh Lagting, atau dalam hal ketidaksepakatan, diputuskan bersama di Storting. Kasus-kasus impeachment diangkat oleh Odelsting dan diadili oleh Lagting sebagai bagian *High Court of the Realm*. Selain itu, fungsi Storting adalah sebagai sebuah parlemen unicameral.

### Pemilihan Parlemen 2005

Pemilihan parlemen Norwegia terakhir dilaksanakan pada tanggal 12 September 2005. Lebih dari 3,4 juta penduduk berhak memberikan suara untuk Storting. Jumlah anggota Storting yang baru adalah 169 anggota, meningkat dari 165 anggota pada pemilu 2001.

Pemilu dimenangkan partai oposisi kiri-tengah Red-Green Coalition, yang didominasi oleh Partai Buruh Norwegia, dengan jumlah perolehan 87 kursi. Koalisi tiga partai peme-

rintah tengah-kanan memperoleh 44 kursi dan kaum populis Progress Party memperoleh 38 kursi, sehingga menjadikannya partai oposisi terbesar. Jumlah pemilih 77,1%, meningkat 2% dari pemilu 2001.

Adapun partai peserta pemilu 2005 sebanyak 21 partai. Tabel berikut merupakan partai-partai yang berhasil memperoleh kursi di parlemen.

#### Partai Pemenang Pemilu

Partai Buruh Norwegia atau The Norwegian Labour Party (*Det norske Arbeiderpartiet*) adalah sebuah partai sosial demokratik di Norwegia. Partai ini didirikan pada tahun 1887 dan pertama kali mengikuti pemilu pada tahun 1894. Mereka akhirnya masuk ke parlemen (1903) dan jumlah pemilihnya meningkat terus sampai

tahun 1927, ketika mereka menjadi partai terbesar di Norwegia muncul partai oposisi yang mengu-rangi perolehan kursi mereka di parlemen.

Pada pemilu 2001, partai ini memperoleh jumlah suara yang tidak banyak yaitu sekitar 24,3%, meskipun masih tetap sebagai partai terbesar di Storting. Sedangkan pada pemilu 2005 perolehan suara meningkat kembali menjadi 32,7%, dengan koalisi partai kanan-tengah Red-Green Coalition yang merupakan gabungan dari Labour Party, Socialist Left Party dan Centre Party, yang memenangkan mayoritas suara. Pemimpin Partai Buruh Jens Stoltenberg hampir bisa dipastikan akan menjadi Perdana Menteri kembali setelah menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun 2000 – 2001.

NAMAPARTAI	JUMLAH SUARA			JUMLAH KURSI	
	#	%	±	total	±
Labour Party ( <i>Arbeiderpartiet</i> )	862,757	32.7	+8.4	51	+18
Progress Party ( <i>Fremskrittspartiet</i> )	582,284	22.1	+7.4	38	+12
Conservative Party ( <i>Hoyre</i> )	372,008	14.1	-7.1	23	-15
Socialist Left Party ( <i>Sosialistisk Venstreparti</i> )	233,069	8.8	-3.7	15	-8
Christian People's Party ( <i>Kristelig Folkeparti</i> )	178,889	6.8	-5.6	11	-11
Centre Party ( <i>Senterpartiet</i> )	171,124	6.5	+0.9	11	+1
Liberal Party ( <i>Venstre</i> )	156,081	5.9	+2.0	10	+8
<b>TOTAL</b>				<b>169</b>	

## SWEDIA

*Kerajaan Swedia* atau *The Kingdom of Sweden* (Swedish: *Konungariket Sverige*) adalah sebuah negara Nordic di Skandinavia, di Eropa Utara. Berbatasan dengan Norwegia di barat, Finlandia di timur laut, Skagerrak Strait dan Kattegat Strait di barat daya, serta Laut Baltik dan Teluk Bosnia di timur. Pertumbuhan penduduk di Swedia termasuk rendah. Sebagian wilayahnya berupa hutan dan gunung yang masing liar.

Secara resmi, sejarah monarki Swedia dimulai sejak 1000 tahun yang lalu, pada saat Swedia menjadi kerajaan Kristen, tetapi bila berdasarkan cerita atau hikayat *Norse sagas*, *Beowulf* dan peninggalan-peninggalan abad pertengahan, sejarah Swedia bisa dikatakan dimulai sejak 2000 tahun yang lalu.

Sejak jaman kebesaran Viking berlalu, Swedia menghabiskan waktu selama hampir 2 abad untuk berperang melawan negara-negara tetangganya, seperti Denmark (dari abad 12 sampai tahun 1710), dan Norwegia (pada abad 16 dan 17). Pada abad 17 dan 18 memperluas wilayahnya melalui perang dan menjadi Kekuatan Besar (*Great Power*), dengan luas wilayah yang menjadi dua kali lipat; tetapi pada abad itu juga wilayah tersebut terlepas kembali.

Sejak 1814, Swedia telah menjadi damai, mengikuti kebijakan untuk menjaga kebebasan beraliansi. Swedia adalah salah satu negara termiskin di

## KONUNGARIKET SVERIGE

	
Capital	Stockholm
Official Languages	Swedish
Government	Constitutional Monarchy, Parliamentary
King	Carl XVI Gustaf
Prime Minister	Göran Persson
Currency	Swedish Krona

Eropa pada abad ke-19, dan dibentuk dengan dogma Protestanisme, hingga sumber daya alam mereka (kayu, bijih besi, gandum) digunakan untuk mendapatkan dana bagi kesejahteraan negara hingga awal abad ke-20.

Sekarang Swedia dikenal sebagai negara dengan kecenderungan liberal dan mempunyai kebijakan nasional yang mengutamakan kesetaraan dan sering mendapatkan ranking-negara-negara tertinggi di bidang itu dalam UN Human Development Index.

### Sejarah

#### Jaman Prasejarah

Swedia dihuni para pemburu dan perambah selama Jaman Batu (*Stone Age*, 6000 BC–4000 BC), setelah terjadinya resesi pada akhir Jaman Es (*the weichsel glaciation*). Wilayah Eropa

Utara berkembang lebih lambat dibandingkan wilayah di Eropa Selatan, ketika bangsa Roma sudah bisa menulis puisi, bangsa Skandinavia baru memasuki Jaman Besi.

Swedia mulai diketahui abad 1 oleh seorang sejarawan Roma bernama Tacitus, yang menulis *The Suiones*. Ia menggambarkan bangsa Swedia yang hidup di laut serta mempunyai kekuatan pada tangan dan kapalnya. Setelah itu, tidak ada lagi sumber yang bisa diketahui.

*Sweden* adalah sebuah nama yang merupakan bentuk jamak dari *Swedes* (*Old English Sweoðeod, Swedish Svear*), yang artinya "bangsa dari Suiones". Istilah ini merujuk pada penduduk Svealand, terutama di sekitar danau Mälaren; kota-kota Stockholm, Sigtuna dan Birka. Wilayah paling selatan dihuni oleh Geats (*Götar*) di Götaland. Selama jaman Viking di abad 9 dan abad 10, para pengembara Viking dari Swedis telah menjelajahi negara-negara Baltik, Rusia dan Laut Hitam, dan melalui danau-danau Rusia menuju ke selatan Eropa.

#### *Jaman Pertengahan*

Melalui Kristenisasi pada abad ke-12, negara menjadi bersatu, dengan pusat pemerintahan di daerah aliran sungai di utara Baltik dan di Teluk Finlandia. Abad ke-14, sebagaimana Eropa lainnya, Swedia diserang wabah penyakit pes, yang memakan banyak korban.

Selama jaman pertengahan, Swedia

melakukan ekspansi ke wilayah utara yang ganas yaitu Laplandia, Semenanjung Skandinavia, dan dilanjutkan ke Norwegia. Finlandia menjadi bagian Swedia pada tahun 1362–1809.

Pada tahun 1389, Norwegia, Denmark, dan Swedia bergabung di bawah satu monarki dalam sebuah perjanjian yang dikenal dengan nama Kalmar Union. Sesudah melewati beberapa peperangan dan pertikaian di antara mereka, Raja Gustav I mendirikan sebuah negara-bangsa, dan meletakkan dasar Swedia modern. Ia menolak Katolikisme dan membawa Swedia kepada Reformasi Protestan. Oleh karena itu, Gustav I dianggap sebagai Bapak Bangsa (*Father of the Nation*).

#### *Sejarah Modern*

Abad ke-19 merupakan masa terjadinya pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan yang — terutama— disebabkan 3 faktor : damai, vaksinasi, dan kentang. Populasi meningkat pada tahun 1750-1850. Banyak penduduk desa berhenti bekerja, menjadi miskin dan terjerat alkohol. Karena itu terjadi emigrasi yang cukup besar terutama menuju ke Amerika Serikat pada sekitar tahun 1850-1910. Tetapi, ketika Revolusi Industri terjadi di Swedia, orang-orang mulai pindah ke kota-kota di Swedia dan bekerja sebagai buruh pabrik, selanjutnya mereka membentuk berbagai perkumpulan Sosialistik. Usaha untuk melakukan

Revolusi Sosial pada tahun 1917 dapat digagalkan, lalu dilakukan pengendalian kembali pada parlementarisme, yang menjadikan Swedia menjadi demokratis.

### Sejarah Masa Kini

Pada abad ke 20, Swedia bersikap netral selama Perang Dunia I dan II, meskipun netralitasnya selama Perang Dunia II diperdebatkan. Swedia tetap bersikap netral selama Perang Dingin—sampai kini tidak menjadi anggota pada kerjasama militer dengan pihak manapun.

Sesudah Perang Dunia II, Swedia memanfaatkan sumber daya alamnya dan tetap mempertahankan negaranya, membuat mereka bisa memperluas industrinya dengan membangun kembali Eropa, sehingga Swedia menjadi negara paling kaya di dunia sampai dengan tahun 1960. Negara dipimpin oleh Swedish Social Democratic Party yang membuat kebijakan *welfare state* sebagai kebijakan utama untuk kebijakan yang lain (*a "well being for all"-policy*). Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di negara lain, ekonomi Swedia mulai menurun pada tahun 1970-an, dan telah penyesuaian secara politik pada tahun 1990-an. Kendati demikian, negara ini masih menduduki ranking sebagai negara yang amat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya.

### Politik

Swedia adalah negara monarki sepanjang sejarahnya, dengan

kebijakan perpajakan dikontrol oleh *Riksdag* (Parlemen). Parlemen terdiri dari 4 *chambers*, yang dibentuk sebagai representasi dari 4 kategori yaitu *peasants* (petani), *nobility* (bangsawan), *clerics* (pekerja), dan *townsmen* (orang perkotaan), sampai dengan tahun 1866 ketika Swedia menjadi Monarki Konstitusional dengan Parlemen Bicameral. Chamber pertama dipilih secara tidak langsung oleh Pemerintah Daerah, dan Chamber kedua dipilih secara langsung pada pemilihan nasional setiap 4 tahun sekali.

Kekuasaan legislatif secara simbolis dilakukan bersama-sama antara Raja dan Parlemen sampai dengan tahun 1975. Tahun 1971, *Riksdag* menjadi unicameral. Secara konstitusi ke-349 anggota memegang kekuasaan tertinggi di Swedia, dan peran itu tidak termasuk *judicial review*. Meski demikian, keputusan Parlemen harus menjadi tidak *applicable* di setiap tingkat apabila hal tersebut bertentangan dengan konstitusi. Undang-Undang bisa diusulkan oleh Kabinet atau anggota parlemen. Anggota parlemen dipilih berdasarkan representasi proporsional untuk masa jabatan 4 tahun.

Konstitusi Swedia dapat diubah oleh *Riksdag*, yang membutuhkan suara *supermajority* dan konfirmasi sebelum pemilihan umum. Swedia mempunyai 3 hukum konstitusional yang lain yaitu *Act of Royal Succession*, *Freedom of Press Act*, dan *Fundamental Law on Freedom of Expression*.

Kekuasaan eksekutif dilakukan bersama-sama antara Raja dan sebuah *Privy Council* bangsawan sampai dengan tahun 1680, dengan mengikuti aturan *King's autocratic rule* yang diusulkan oleh perwakilan umum di Parlemen. Sebagai reaksi dari kegagalan *Great Northern War*, Parlemenarisme diperkenalkan pada tahun 1719, dengan mengikuti tiga selera yang berbeda dari Monarki Konstitusional pada tahun 1772, 1789 dan 1809, akhirnya diberikan beberapa jaminan untuk kemerdekaan sipil. Monarki akhirnya hanya berfungsi untuk tugas seremonial dan simbol pemersatu negara.

Sosial demokrasi berperan sangat dominan pada politik sejak tahun 1917, sesudah para reformis mempunyai kekuatan dan para revolusioner meninggalkan partai. Sesudah 1956, kabinet didominasi oleh kaum sosial demokrat. Hanya tiga kali pemilu kelompok tengah-kanan telah mendapatkan cukup kursi di Parlemen

untuk menjalankan pemerintahan.

Beberapa sosok terkenal dari Swedia yang mendapatkan pengakuan internasional antara lain Joe Hill (aktivis buruh), Raoul Wallenberg (diplomat), Dag Hammarskjöld (Sekjen PBB tahun 1953 yang meninggal karena kecelakaan pesawat terbang tahun 1961), Olof Palme (Perdana Menteri Swedia sejak tahun 1982 dan meninggal karena pembunuhan pada tahun 1986), dan Hans Blix (diplomat dan politisi, ketua dari *UN Monitoring, Verification, and Inspection Commission* tahun 2000-2003). □

#### DAFTAR PUSTAKA

Wiarda, Howard J (Ed.) *European Politics in the Age of Globalization*, Philadelphia: Harcourt College Publisher, 2001

<http://en.wikipedia.org/wiki/Europe>

<http://europa.eu.int/>